



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH

Alamat: Jln. Tan Malaka 177 Koto Baru Simalanggang Telp. 0752 7972094 Kode Pos. 26251

KEPUTUSAN CAMAT PAYAKUMBUH
NOMOR 142 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN CAMAT PAYAKUMBUH NOMOR : 1 TAHUN 2021 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (PPK)
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN
PADA KECAMATAN PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT PAYAKUMBUH

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Camat Payakumbuh dengan suatu Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 882/750/BKPSDM-LK/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan Keputusan Camat Payakumbuh Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada Kantor Camat Payakumbuh Tahun Anggaran 2021.

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Negara RI Tahun 2014;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
1. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK) ;
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPK.
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP LS Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - c. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
 - f. Melakukan akuntansi keuangan SKPD.
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
 2. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Payakumbuh Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2021.

Ditetapkan di : Koto Baru Simalanggang
Pada Tanggal : 2 Agustus 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PAYAKUMBUH

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN CAMAT PAYAKUMBUH NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KEC. PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2021

Nama Kegiatan			
No.	Nama/NIP.	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	RINI HUTRIA, Amd NIP. 19820816 200501 2 009	Kasubag. Keuangan dan Perencanaan Pelaporan	Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK)
2.	KHAIRANI. S. Sos NIP. 19650912 198903 2 002	Kasi Kesejahteraan Sosial	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3.	Dra. YARNAWILIS NIP. 19640802 199003 2 002	Kasi Pemerintahan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4.	H. DAHASMAN. SE NIP. 19640722 199102 1 001	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.	YOSSI MISWARDI. SS NIP. 19790607 200801 2 005	Kasi Pelayanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
6.	MARDALENI. S. Sos NIP. 19730313 199303 2 003	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
7.	NELNI EKA FITRI, SP NIP. 19691224 200604 2 003	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Koto Baru Simalanggang, 2 Agustus 2021

CAMAT PAYAKUMBUH

IONANTO SUTP

NIP. 19810531 200012 1 001



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 269 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : 1. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 175/Set.DPRD/VII/2021 Perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021.
2. Surat Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 800/629/DP-LK/2021 Perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021.
3. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 550/609/Inaker.1/VII/2021 Perihal Usulan Perubahan KPA.
4. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 900/571/DPMD-N/2021 Perihal Pengiriman Usulan Perubahan KPA.
5. Surat Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 900/1326.1/BK-LK/2021 Perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran TA 2021.
6. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1196/1/Kominfo-LK/VII-2021 Perihal Usulan KPA Tahun 2021.
7. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 990/1475/Diskes.1/2021 Perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021.
8. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 551/2058/Dishub-LK/2021 Perihal Pengiriman Nama PA, KPA dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2021.
9. Surat Direktur RSUD dr. Achmad Darwis Nomor 445/1123/RSUD AD/VII/2021 Perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran.
10. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 050/DisnakKeswan-LK/VII/2021 Perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran.

11. Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1934/Sekre.1/Perdag.Kop.UKM/VII/2021 Perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran TA 2021.
12. Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 523/887/Set-Diskan/2021 Perihal Usulan KPA dan Bendahara Penerima Tahun 2021.
13. Surat Kepala Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 800/211/DPPKBP3A-LK/VIII/2021 Perihal Usulan KPA.
14. Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 821/115/DPK/2021 Perihal Permohonan Revisi Kuasa Pengguna Anggaran.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 terkait dengan materi lampirannya secara utuh sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 28 Juli 2021



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 269 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 JULI 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KETERANGAN
		3	4	
1	Dra. Lina Medona, MM NIP. 19690515 199308 2 001	Kepala Bagian Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Administrasi Pemerintahan - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri - Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri 	Sekretariat Daerah
2-3				
4	Ir. Ice Yuliani NIP. 19611016 199003 1 004	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 	
5				Sekretariat Daerah
6	Ria Wijayanty, ST, MT NIP. 19770413 200003 2 002	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan - Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 	
7				
8	Wiradinata F, S, STP NIP. 19831027 200212 1 001	Kepala Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Perawatan dan Peringkasan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional 	Sekretariat Daerah

NAMA / NIP		JABATAN DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN		KETERANGAN
9	Maskib, SE, MM NIP. 19640323 199701 1 001	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/ Wakil KDH 	Sekretariat Daerah
10	Hendra, S.Pd, MM NIP. 19661020 199702 1 001	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Keprotokolan - Fasilitas Komunikasi Pimpinan - Pendokumentasian Tugas Pimpinan 	Sekretariat Daerah
11	Dra. Rita Indralisty NIP. 19680619 199402 2 001	Inspektur Pembantu II	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan - Pendampingan dan Asistensi 	Inspektorat
12	Dihapus			
13-19				
20	Indra Atmaja, S.Sos NIP. 19750121 200003 1 001	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 	Badan Keuangan
21-22				
23	Erinaldi, SH NIP. 19770508 200701 1 008	Kabid Pengembangan dan Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Mutasi ASN - Pengelolaan Promosi ASN - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 	BKPSDM

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN		KETERANGAN
44-45			<ul style="list-style-type: none">- Pembinaan Disiplin ASN- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN- Pelaksanaan Proses Izin Perceraian Pegawai		
46	dr. Erva Yora NIP. 19761024 200901 2 002	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Dinas Kesehatan
7-48					
49	dr. H. Erdison NIP. 19691201 200212 1 002	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Dinas Kesehatan
50-52					
53	dr. Hefi Riansyah NIP. 19851128 201407 2 001	Plt. Kepala UPTD Puskesmas Batu Hampar	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Pelayanan BLUD- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Dinas Kesehatan
54-74					
75	Susy Letrini, S.Pi, M.Si NIP. 19750226 200312 2 004	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah- Administrasi Umum Perangkat Daerah- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah- Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dinas Perikanan
76-81					
82	Aldasman, S.Pd NIP. 19640720 198410 1 001	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah- Administrasi keuangan perangkat daerah- Administrasi kepegawaian perangkat daerah- Administrasi umum perangkat daerah- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Dinas Perhubungan
83	H. Erizal, S.ST NIP. 19651108 198603 1 010	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	<ul style="list-style-type: none">- Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah kabupaten/ kota- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota- Pengujian berkala kendaraan bermotor- Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Dinas Perhubungan
84	Delfis Azwar, SH NIP. 19670506 199003 1 005	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan dan kabupaten/ kota- Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan- Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/ kota		Dinas Perhubungan

JABATAN
DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KETERANGAN

NO

NAMA / NIP

- Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota

- Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota
- Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi
- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota

- Seluruh Program dan Kegiatan Bidang Perpustakaan

- Administrasi umum perangkat daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

- Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kab/ Kota

- Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/ kota
- Advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/ kota

- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
- Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja
- Pelayanan antar kerja

- Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
- Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah Kabupaten/ Kota
- Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi
- Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah Kab/Kota

Dinas Perdagangan
Koperasi dan UKM

Dinas Pangan

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

RSUD dr. Achmad Darwis

RSUD dr. Achmad Darwis

RSUD dr. Achmad Darwis

Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja

NO	NAMA / NIP	JABATAN DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Job Fair / Bursa Kerja - Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan - Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan - Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan 	
128	Muhammad Rafi Azka, S.Kom NIP. 19770712 200604 1 005	Kabid Aplikasi & Teknologi Informatika <ul style="list-style-type: none"> - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domian dan Sub Domian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah - Pelaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - Penyelenggaraan Sistem Penghubungan Layanan Pemerintah - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Kota Cerdas dan Kota Cerdas 	Dinas Komunikasi dan Informatika
129	Nuzul Firman, S.IP, M.Si NIP. 19780821 200501 1 009	Sekretaris <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Dinas dan Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 	Dinas Komunikasi dan Informatika
130	Titin Mulyani, SE, M.Si NIP. 19730202 199703 2 008	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Informasi Publik - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral - Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 	Dinas Komunikasi dan Informatika
131	Mira Ningsih, ST, M.Si NIP. 19770306 200212 2 005	Kepala Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Nasional - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	NAMA / NIP		JABATAN	DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
132					
133	Wahyu Marmora Samri, SH	NIP. 19710328 200604 1 004	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Fasilitasi Tugas DPRD - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Peningkatan Kapasitas DPRD - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - Pelaksanaan Kerjasama Daerah - Layanan Administrasi DPRD 	Sekretaris DPRD
134-150					
151	Bambang Irawan, S.IP, M.SI	NIP. 19810620 201001 1 019	Sekretaris Camat Luak	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	Kecamatan Luak
152-155					
156	Aidil Fitri B, S.Ag	NIP. 19740715 200801 1 018	Sekretaris Camat Kapur IX	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Program dan Kegiatan di Kecamatan Kapur IX 	Kecamatan Kapur IX
157-158					
159	Yalbaku Jevino, S.STP	NIP. 19860530 200412 1 002	Seckam Gunung Omeh	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Program dan Kegiatan di Kecamatan Gunung Omeh 	Kecamatan Gunung Omeh
160-165					
166	Irmawati, S.Pi	NIP. 19800512 200312 2 003	Kabid Keterseediaan, Distribusi & Harga Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota - Pengelolaan dan Keselamatan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota - Penyusunan Peta Ketersediaan dan Ketersediaan Pangan Kecamatan - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota 	Dinas Pangan
167	Afrizal, S.Sos, M.Si	NIP. 19720817 199202 1 001	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi - Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan jasa surat menyurat 	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

JABATAN

DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NAMA / NIP

KETERANGAN

			<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN - Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - Fasilitas kunjungan tamu - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Evaluasi kinerja perangkat daerah 			DPMDN
168	Nining Eka Fitriah, SH NIP. 19790827 200501 2 007	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kerjasama Antar Desa - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama 			
169	Tajul Arifin, S.Pi, M.Si NIP. 19821105 201001 1 014	Kepala Bidang Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 			Dinas Perhubungan
170	Deni Permana, S.Sos NIP. 19701212 200212 1 002	Kabid Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik - Pengelolaan Media Komunikasi Publik - Layanan Hubungan Media - Manajemen Komunikasi Publik 			Dinas Komunikasi dan Informatika
171	dr. Yulva Roza NIP. 19740703 200607 2 009	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/ kota 			RSUD dr. Achmad Darwis
172	Yasti, SP NIP. 19640318 198903 1 004	Kepala Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
173	Witira Porsepwardi, S.Pi NIP. 19740510 200003 1 004	Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten/kota - Pemberitaan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu daerah Kab/ Kota 			Dinas Perikanan
174	Rahima, S.Sos NIP. 19751031 200212 2 002	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi 			DP2KBP3A

**JABATAN
DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	NAMA / NIP	KETERANGAN
		Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota
		- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota
175	Rahmawati Putri, SE NIP. 19790213 200901 2 004	Sekretaris Camat Mungka
		- Seluruh Program dan Kegiatan di Kecamatan Mungka
176	Apri Yulianto, S.Sos NIP. 19690718 200701 1 004	Sekcam Payakumbuh
		- Seluruh Program dan Kegiatan di Kecamatan Payakumbuh
		Kecamatan Mungka
		Kecamatan Payakumbuh

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 28 Juli 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SARUDDIN DE SANDARO RAJO

**REKAPITULASI : ASET TETAP, ASET LAINNYA DA PERSEDIAAN
BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG DI AUDITED TAHUN 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG	NILAI (Rp.)	KET
1	TANAH (KIB A)	1	145.320.000	
2	PERALATAN DAN MESIN (KIB B)			
	Kendaraan Roda 4 (Empat)	1	126.379.000	
	Kendaraan Roda 2 (Dua)	9	128.812.115	
	Alat Angku Apung			
	Alat Angkutan tak bermotor	2	700.000	
	Alat berat (besar)			
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	247	324.484.100	
	Alat Kedokteran			
	Alat Laboratorium			
	Alat Pertanian	1	454.000	
	Alat Persenjataan daan Keamanan			
	Alat Bengkel dan alat ukur			
	alat studio dan alat komunikasi	5	27.520.000	
	Rambu-rambu			
	Peralatan Olah Raga			
3	BANGUNAN dan GEDUNG	11	866.494.800	
	Bangunan Gedung			
	Monumen			
	Bangunan Menara			
	Tugu Titik Kontrol / Pasti			
4	JALAN, IRIGASI dan JARINGAN (KIB D)	2	6.490.000	
	Jalan			
	Jembatan			
	Irigasi			
	Jaringan / Instalasi			
5	ASET TETAP LAINNYA (KIB E)			
	Buku			
	Ternak dan Tanaman			
	Benda Seni			
6	KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN (KB F)			
7	ASET LAINNYA			
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	Aset tak berwujud			
	Aset lain-lain			
8	PERSEDIAAN	5 rim	200.000	kertas hvs

GAMAT PAYAKUMBUN

JONIAN TOGHTIP

Nip. 19810513 200012 1 001



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 265 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Pulu Kota maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Pulu Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Pulu Kota Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/750/BKPSDM-LK/2021 Tanggal 9 Juli 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :
: Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 259 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 terkait materi lampirannya secara utuh sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 21 Juli 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 265 TAHUN 2021
 TANGGAL : 21 JULI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
1-26	-	-	-
27	dr. HENKY PRAMUDYA, Sp.B NIP. 19741209 200501 1 006	Pj. Direktur RSUD dr. Achmad Darwis Suliki	1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
28	JONIANO, S.STP NIP. 19800531 200012 1 001	Camat Payakumbuh	1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
29-30	-	-	-
31	ENDRA AMZAR, SH NIP. 19680906 199603 1 001	Camat Guguk	1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
32-34	-	-	-
35	RICKY EDWAR, S.Sos NIP. 19700928 199803 1 004	Camat Mungka	1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
36-43	-	-	-

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 21 Juli 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



BANDARO RAJO